

ABSTRAK

Pelanggaran hak asasi manusia adalah kejahatan penyalahgunaan kekuasaan terhadap norma-norma hukum tentang HAM yang dikaitkan dengan keterlibatan negara sebagai subjek penanggung jawab HAM. Dugaan adanya pelanggaran HAM berarti bahwa perbuatan yang dimaksudkan belum benar-benar terjadi atau masih dalam tahap perkiraan. Wujud dari keseriusan pemerintah dalam menangani banyaknya pengaduan terkait dugaan pelanggaran HAM serta sebagai bentuk penghormatan dan pemenuhan terhadap HAM maka dibentuklah Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat di bawah Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. Berdasarkan latar belakang tersebut maka diperoleh rumusan masalah terkait bagaimana proses penyelesaian dugaan adanya pelanggaran HAM di tahun 2022 serta apa saja hambatan dan solusi penyelesaian dugaan adanya pelanggaran HAM di tahun 2022.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif mengenai kewenangan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam menyelesaikan dugaan adanya pelanggaran HAM baik dari sudut ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan Kementerian Hukum dan HAM itu sendiri. Untuk menjawab permasalahan yang dibahas, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara untuk menyempurnakan data dan pembuktian terhadap data yang telah diperoleh sebelumnya.

Hasil penelitian penulisan hukum ini adalah bentuk penyelesaian dugaan adanya pelanggaran HAM yang terdiri atas penerimaan, penelaahan, koordinasi dan memberikan surat rekomendasi yang tertera dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Terkait dengan hambatan terbagi ke dalam hambatan internal yang berasal dari minimnya kuantitas pegawai, minimnya anggaran, serta rekomendasi yang bersifat tidak mengikat. Selain itu terdapat pula hambatan eksternal berupa minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya HAM serta terdapat beberapa lembaga atau instansi yang tidak memberikan respon atas rekomendasi yang diberikan.

Berdasarkan pada hambatan yang ada maka terdapat solusi untuk meminta penambahan jumlah pegawai, menentukan anggaran di awal tahun, memantau proses penyelesaian dugaan adanya pelanggaran HAM, memberikan penyuluhan tentang HAM, dan menjalin koordinasi lebih erat. Terkait dengan saran yang diberikan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI untuk dapat menyelesaikan dugaan adanya pelanggaran HAM berdasarkan pada aturan yang ada, sedangkan untuk masyarakat diharapkan untuk dapat lebih memahami akan pentingnya HAM, dan untuk instansi atau lembaga terkait diharapkan untuk lebih responsif terkait penanganan dugaan adanya pelanggaran HAM.

Kata Kunci: *Kementerian Hukum dan HAM RI, Dugaan Adanya Pelanggaran HAM, Pelayanan Komunikasi Masyarakat*

ABSTRACT

Violation of human rights is a crime of abuse of power against legal norms regarding human rights which are associated with the involvement of the state as the subject responsible for human rights. Allegations of human rights violations mean that the intended actions have not actually occurred or are still in the conjecture stage. As a manifestation of the government's seriousness in handling the many complaints related to alleged human rights violations and as a form of respect and fulfillment of human rights, the Directorate of Public Communication Services was formed under the Directorate General of Human Rights, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Based on this background, a formulation of the problem is obtained regarding the process of resolving allegations of human rights violations in 2022 and what are the obstacles and solutions to resolving allegations of human rights violations in 2022.

The research method used in this thesis is normative juridical regarding the authority of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in resolving allegations of human rights violations both from the point of view of statutory provisions and the policies of the Ministry of Law and Human Rights itself. To answer the problems discussed, this research uses data collection methods through literature studies and interviews to refine the data and prove the data that has been previously obtained.

The results of this research on legal writing are a form of resolution for allegations of human rights violations which consist of receiving, reviewing, coordinating and providing recommendation letters as stated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 23 of 2022 concerning Handling of Alleged Human Rights Violations. Regarding the obstacles, they are divided into internal obstacles that come from the minimum number of employees, the lack of budget, and non-binding recommendations. In addition, there are also external obstacles in the form of the lack of public understanding of the importance of human rights and there are several institutions or agencies that do not respond to the recommendations given.

Based on the existing obstacles, there is a solution to request an increase in the number of employees, determine the budget at the beginning of the year, monitor the process of resolving allegations of human rights violations, provide counseling on human rights, and establish closer coordination. Regarding the advice given to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to be able to resolve allegations of human rights violations based on existing regulations, it is hoped that the public will be able to better understand the importance of human rights, and related agencies or institutions are expected to be more responsive regarding the handling of allegations of human rights violations. human rights violations.

Keywords: Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, Allegations of Human Rights Violations, Community Communication Services